

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No.101 Tahun 2000 pada pasal 2 huruf d dalam (Jauhari, dkk, 2019:8) yang dimaksud dengan “kepemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat”.

Menurut World Bank, *Good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran dalam alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) (2008), “Prinsip dasar untuk mewujudkan dan menjaga kredibilitas negara dan lembaga negara, pelaksanaan *Good publik governance* harus dilandasi oleh nilai-nilai sebagai pegangan moral bagi penyelenggara negara, pegawai”. Untuk itu, diperlukan etika dan pedoman perilaku yang dapat menjadi acuan bagi penyelenggara Negara dan pegawai dalam menerapkan nilai-nilai yang disepakati.

Berdasarkan para pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa *good governance* dapat diartikan sebagai konsep penyelenggaraan pemerintah bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi, serta merupakan kegiatan bersama untuk mengelola berbagai sumber daya menuju pembangunan yang dapat berkelanjutan secara efektif dan efisien melalui pembuatan kebijakan yang absah demi terwujudnya kesejahteraan rakyat dan tata kelola pemerintahan yang baik.

2.1.1.1 Prinsip- Prinsip Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Prinsip-prinsip atau karakteristik pelaksanaan *Good Governance* menurut *United Nation Development Program* dalam Mardiasmo (2018:32) memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan *Good Governance*, meliputi :

1. Partisipasi (*Participation*) Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
2. Pengawasan (*Rules of Law*) Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh tanpa pandang bulu, terutama aturan hukum tentang hak asasi manusia.
3. Transparansi (*Transparency*) Transparansi harus dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.
4. Daya Tanggap (*Responsiveness*) Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*) dengan kata lain lembaga-lembaga publik harus cepat tanggap dalam melayani stakeholder.
5. Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*) Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas, berperan sebagai penengah atas berbagai kepentingan masyarakat untuk mencapai kebijakan yang terbaik atas kepentingan masing-masing pihak. Pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak
6. Berkeadilan (*Equity*) Pemerintah yang baik akan memberikan kesempatan yang sama terhadap masyarakatnya dalam upaya mereka untuk meningkatkan kualitas hidupnya demi memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
7. Efektif dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*) Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif). Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang sesuai kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber yang tersedia
8. Akuntabilitas (*Accountability*) Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan berdasarkan dampak dari keputusan yang diambil. Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik masyarakat umum sebagaimana halnya kepada para pemilik.
9. Visi Strategis (*Strategic Vision*) Penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan. Setiap stakeholder memiliki perspektif yang luas dan panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pimpinan dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

2.1.1.2 Teori Stewardship

Grand Theory yang mendasari penelitian ini adalah bagian dari *agency theory* yaitu *Stewardship Theory*. Teori *Stewardship* mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai steward dan bertindak sesuai kepentingan pemilik (Donaldson & Davis, 1989, 1991) dalam Raharjo (2007:37). Teori ini menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Menurut Said (2015:102) “Teori *Stewardship* berdasarkan asumsi filosofis mengenai sifat manusia bahwa manusia yang pada hakikatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain”.

Teori *Stewardship* dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan yang sejak awal perkembangannya, akuntansi sector publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara stewards dengan participals. Pemerintahan selaku stewards dengan fungsi pengelola sumber daya dan rakyat selaku principal pemilik sumber daya. Terjadi kesepakatan yang terjalin antara pemerintah (*steward*) dan rakyat (*principal*) berdasarkan kepercayaan, kolektif, sesuai tujuan organisasi. Organisasi sector publik memiliki tujuan memberikan pelayanan kepada publik dan dapat pertanggungjawabkan kepada masyarakat (publik).

Implikasi Teori *Stewardship* terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi Pemerintah Daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut maka stewards (pemerintah) mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifkan pengendalian intern untuk dapat menghasilkan laporan informasi keuangan yang berkualitas.

2.1.1.3 Visi dan Misi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan

2.1.1.3.1 Visi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan

Dalam jangka menengah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Selaras dengan tujuan pendidikan tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan menetapkan visi yang ingin dicapai dalam pembangunan pendidikan adalah:

“Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang bertaqwa, cerdas dan berbudaya”

2.1.1.3.2 Misi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan

Guna mewujudkan visi tersebut diatas, maka misi pembangunan pendidikan yang ingin diwujudkan sesuai dengan Rencana Strategi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan 2020 adalah:

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi masyarakat Sumatera Selatan
2. Melaksanakan komitmen sekolah gratis
3. Mengembangkan potensi anak secara utuh sejak usia dini dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar di Sumatera Selatan
4. Mewujudkan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian anak
5. Meningkatkan pelayanan pendidikan berbasis ICT
6. Meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan, pengalaman, sikap dan nilai budaya bangsa.
7. Memberdayakan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

2.1.2 Anggaran

2.1.2.1 Pengertian Anggaran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pengertian anggaran atau APBN/D yaitu sebagai berikut:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pengertian Anggaran menurut Arif (2002:14) “Anggaran sebagai catatan masa lalu, rencana masa depan, mekanisme pengalokasian sumber daya, metode

untuk pertumbuhan, alat penyalur pendapatan, mekanisme untuk negosiasi, harapan-aspirasi-strategi organisasi, suatu bentuk kontrol dan alat atau jaringan komunikasi.

2.1.2.2 Pengertian Kinerja Anggaran

Menurut Bastian, (2012:52):

“Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi.”

Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Dalam anggaran selalu disertakan data penerimaan dan pengeluaran yang terjadi dimasa lalu. Kebanyakan organisasi sektor publik membedakan antara tambahan ekuitas dan penerimaan, serta tambahan pendapatan dan pengeluaran. “Hal ini akan berdampak pada pemisahan penyusunan anggaran tahunan dan anggaran ekuitas tahunan” (Bastian, 2010:191).

Menurut Mardiasmo, (2011:61):

“Anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran *financial*, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran.

Menurut Ulum dan Sofyani (2016:125) Anggaran Kinerja dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 menyatakan bahwa :

Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 telah mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyusun APBD nya dalam bentuk anggaran kinerja, standar kinerja, standar biaya dan *benchmark* dari setiap jenis pelayanan. Anggaran harus didasarkan atas sasaran yang hendak dicapai pada tahun anggaran tersebut, adanya standar pelayanan dan adanya ukuran biaya satuan. Setiap unit harus bisa merencanakan anggarannya berdasarkan tugas pokok tertentu yang di sertai dengan indikator penilaian yang jelas dan bisa diukur sehingga masing-masing tingkat dalam suatu unit akan mempunyai tanggungjawab yang jelas. Dengan sistem ini, biaya satuan setiap jenis pelayanan harus bisa diukur, sehingga bisa diukur tingkat efisiensi dan efektifitas dari setiap pelayanan. Dengan anggaran kinerja akan terlihat hubungan jelas antara input, output dan outcome yang mendukung terciptanya sistem pemerintahan yang baik. Dengan pendekatan kinerja

ini, bisa terlihat tanggung jawab (*accountability*) dan keterbukaan (*transparency*) dalam melaksanakan pelayanan pada masyarakat. Jadi dengan anggaran kinerja, jumlah anggaran yang disediakan (*input*) untuk suatu unit kerja akan setara dengan jumlah pelayanan yang bisa dilakukan unit tersebut kepada masyarakat (*output*).

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kinerja anggaran merupakan penilaian dan pengukuran suatu biaya anggaran yang digunakan untuk memproduksi atau mengembangkan suatu jasa.

2.1.3 Konsep Value For Money

Menurut Mahmudi (2015:83) mendefinisikan konsep *Value for Money* merupakan “konsep pengelolaan organisasi sektor public yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, dimana pengertian dari ketiga konsep tersebut adalah:

1. Ekonomi: konsep ekonomi sangat terkait dengan konsep biaya untuk memperoleh unit *input*. Ekonomi memiliki pengertian bahwa sumber daya input hendaknya diperoleh dengan harga lebih rendah, yaitu harga yang mendekati harga pasar.
2. Efisiensi: efisien terkait dengan hubungan antara *output* berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan *output* tersebut. Secara sistematis, efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input atau istilah lain *output per unit input*.
3. Efektivitas: efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2009:130) untuk indikator *Value for Money* di bagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Indikator alokasi biaya (ekonomi dan efisiensi)
Ekonomi artinya pembelian barang dan jasa dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik (*spending less*). Efisiensi artinya output tertentu dapat dicapai dengan sumber daya yang serendah-rendahnya (*spending well*).
2. Indikator kualitas pelayanan (efektivitas)
Efektivitas artinya kontribusi output terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (*spending wisely*).

Menurut Mardiasmo (2009:133) Ada empat langkah dalam pengukuran *Value for Money*, yaitu:

1. Pengukuran Ekonomi

Ekonomi merupakan pengukuran relative pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan.

Pertanyaan sehubungan dengan pengukuran ekonomi adalah :

- a. Apakah biaya organisasi lebih besar dari yang telah dianggarkan oleh organisasi ?
- b. Apakah biaya organisasi lebih besar daripada biaya organisasi lain yang sejenis yang dapat diperbandingkan?
- c. Apakah organisasi telah menggunakan sumber daya finansialnya secara optimal?

2. Pengukuran Efisiensi

Efisiensi merupakan hal penting dalam konsep *Value for Money*. Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi.

3. Pengukuran Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh jadi dua kali lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar daripada yang telah dianggarkan.

4. Pengukuran *Outcome*

Outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. *Outcome* lebih tinggi nilainya daripada output, karena output hanyamengukur hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat, sedangkan *outcome* mengukur kualitas output dan dampak yang dihasilkan. Pengukuran *outcome* memiliki dua peran, yaitu peran retrospektif yang terkait dengan penilaian kinerja masa lalu dan peran prospektif yang terkait dengan perencanaan kinerja di masa yang akan datang. Manfaat yang diharapkan dapat diambil dengan adanya implementasi.

2.1.4 Transparansi

Menurut Mahmudi, (2011:17-18):

“Transparansi memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik

kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi juga berarti adanya penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang aktivitas, program, dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakan”.

Renyowijoyo, (2013: 12) mendefinisikan:

“Transparansi merupakan salah satu prinsip good corporate governance. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi yang dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau”.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa transparansi adalah informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat dapat mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban dalam mengelola sumber daya. sehingga dapat terciptanya pemerintahan daerah yang baik dan memikirkan kepentingan masyarakat.

Transparansi dapat diukur dengan beberapa indikator. Menurut Ardianto (2011:21), indikator transparansi yaitu:

- a. Ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi
 1. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur persoalan transparansi
 2. Adanya kerangka kerja hukum yang memberi definisi yang jelas tentang peran dan tanggungjawab bagi semua aspek kunci dari manajemen fiscal.
 3. Adanya basis legal untuk pajak
 4. Adanya basis legal untuk mempertanggungjawabkan belanja dan kekuasaan memungut pajak dari pemerintah daerah.
 5. Adanya pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing tingkatan.
- b. Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran
 1. Adanya keterbukaan dalam kerangka kerja anggaran (proses penganggaran)
 2. Diumumkannya setiap kebijakan anggaran
 3. Dipublikasikannya hasil laporan anggaran yang telah diaudit oleh Lembaga yang berwenang
 4. Adanya dokumentasi anggaran yang baik yang mengandung beberapa indikasi fiscal
 5. Terbukanya informasi tentang pembelanjaan actual
- c. Adanya audit yang independent dan efektif
 1. Adanya Lembaga audit yang independent dan efektif

2. Adanya kantor statistik yang akurasi datanya berkualitas
 3. Adanya system peringatan dini (*early warning system*) dalam kasus buruknya eksekusi atau keputusan anggaran
- d. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran
1. Adanya keterbukaan informasi selama proses penyusunan anggaran
 2. Adanya kesempatan bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran

2.1.5 Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2009: 20), akuntabilitas publik harus dilakukan oleh organisasi sektor publik yang terdiri dari beberapa dimensi, Ellwood menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas Kejujuran Dan Akuntabilitas Hukum (*accountability for probity and legality*)
Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
2. Akuntabilitas Proses (*process accountability*)
Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya markup dan pungutan-pungutan lain di luar yang ditetapkan, serta sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahal biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan. Pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas proses juga terkait dengan pemeriksaan terhadap proses tender untuk melaksanakan proyek proyek publik. Yang harus dicermati dalam pemberian kontrak tender adalah apakah proses tender telah dilakukan secara fair melalui *Compulsory Competitive Tendering* (CCT)
3. Akuntabilitas Program (*program accountability*)
Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
4. Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*)

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Menurut Renyowijoyo, (2013: 14):

“Akuntabilitas merupakan konsep yang lebih luas dari stewardship. Stewardship mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan, sedangkan *accountability* mengacu pada pertanggungjawaban oleh seorang steward kepada pemberi tanggungjawab”.

Mardiasmo, (2009:4) lebih lanjut mengidentifikasi tiga elemen utama akuntabilitas, yaitu:

1. Adanya kekuasaan untuk mendapatkan persetujuan awal sebelum sebuah keputusan dibuat. Hal ini berkaitan dengan otorisasi untuk mengatur perilaku birokrat dengan menundukkan mereka di bawah persyaratan prosedural tertentu serta mengharuskan adanya otorisasi sebelum langkah tertentu diambil
2. Akuntabilitas peran yang merujuk pada kemampuan seorang kepala untuk menjalankan sebagai kewajiban utama. Ini merupakan tipe akuntabilitas yang langsung berkaitan dengan hasil sebagaimana diperjuangkan paradigma manajemen public baru (*new public management*). Hal ini mungkin saja tergantung pada target kinerja formal yang berkaitan dengan gerakan manajemen publik baru; dan
3. Peninjauan ulang secara retrospektif yang mengacu pada analisis operasi suatu departemen setelah berlangsungnya suatu kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga eksternal seperti kantor audit, komite parlemen, atau Lembaga peradilan. Aspek subyektivitas dan ketidak terprediksikan dalam proses peninjauan ulang seringkali bervariasi, tergantung pada kondisi dan aktor yang menjalankannya.

2.1.6 Partisipasi

Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas Menurut Atkinson dalam (Christine dan Agustina, 2010) :

“Partisipasi Anggaran merupakan suatu metode penyusunan anggaran yang meliputi proses pengambilan keputusan bersama dan semua bagian setuju untuk menyusun target anggaran”.

Oleh karena itu semakin tinggi partisipasi maka kinerja anggaran akan semakin meningkat Hubungan Transparansi terhadap Kinerja Anggaran.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Premananda dan Latrini, 2017) yang menyatakan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif pada kinerja anggaran. Hal ini mengindikasikan bahwasanya partisipasi anggaran berperan sangat berarti dalam pelaksanaan kinerja anggaran.

2.1.7 Kualitas Sumber Daya Manusia

Suharto (2012) mendefinisikan “kualitas sumber daya manusia sebagai kemampuan dari pegawai dalam menjalankan tugasnya dilihat dari kemahiran seseorang, latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan dan profesionalisme dalam bekerja”. Matutina (2001) Kualitas kerja mengacu kepada kualitas sumber daya manusia yang mencakup komponen-komponen berikut :

1. Pengetahuan (*Knowledge*) yaitu kemampuan yang dimiliki pegawai lebih berorientasi pada inteleni dan daya fikir serta penguasaan ilmu yang luas yang dimiliki pegawai.
2. Keterampilan (*Skill*) yaitu kemampuan dan penguasaan teknis operasional dibidang tertentu yang dimiliki pegawai.
3. Kemampuan (*Ability*) yaitu kemampuan yang terbentuk dari jumlah kompetensi yang dimiliki seseorang karyawan (pegawai) yang mencakup loyalitas, kedisiplinan, kerjasama dan tanggung jawab.

Sumber Daya Manusia adalah pegawai yang siap, mampu dan siaga dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Sebagaimana dikemukakan bahwa dimensi pokok sisi sumber daya adalah kontribusinya terhadap organisasi, sedangkan dimensi pokok manusia adalah perlakuan kontribusi terhadapnya yang pada gilirannya akan menentukan kualitas. (Werther & Davis, 1996).

Abdurrahmat Fathoni (2006) mendefinisikan :

“Sumber Daya Manusia merupakan modal dan kekayaan yang terpenting dari setiap kegiatan manusia. Manusia sebagai unsur terpenting mutlak dianalisis dan dikembangkan dengan cara tersebut. Waktu, tenaga dan kemampuannya benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan organisasi, maupun bagi kepentingan individu”.

2.1.8 Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu (*timeliness*) merupakan sebuah informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan dan sebelum informasi tersebut telah kehilangan kemampuannya untuk mempengaruhi sebuah keputusan. Tepat waktu diartikan

bahwa informasi harus disampaikan sedini mungkin untuk dapat digunakan sebagai dasar untuk membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi dan untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut.

Menurut Baridwan (2012) mendefinisikan :

“Informasi yang disampaikan tepat waktu dapat digunakan sebagai dasar untuk membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi dan untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan”.

Menurut Nadirsyah (2012) mendefinisikan :

“Ketepatan Waktu adalah yang menunjukkan bahwa ketepatan jadwal penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja majerial. Jika dalam sebuah anggaran daerah mampu memberikan informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu maka semakin tinggi pula kinerja anggaran berkonsep *Value for Money*.”

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian yang dilakukan oleh penulis diatas terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang akan dibahas dalam penelitian ini yang dapat memberikan referensi dan membantu penulis dalam penyusunan penelitian ini yang berkaitan dengan variable-variable yang akan di uji sebagai landasan dan referensi dalam penulisan penelitian. Variabel-variabel tersebut yaitu Transparansi (X_1), Akuntabilitas (X_2), Partisipasi (X_3), Kualitas Sumber Daya Manusia (X_4), Dan Ketepatan Waktu (X_5) terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep *Value For Money* (Y). Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang telah penulis rangkum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Perbedaan	Persamaan	Hasil Penelitian
1	Ninik Puspita Sari (2020)	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep <i>Value for Money</i> pada Pemerintah Kota Surabaya	X1: Akuntabilitas X2: Transparansi Y: Kinerja Anggaran Berkonsep <i>Value for Money</i>	1. Hanya menggunakan 2 variabel X 2. Terdapat perbedaan tempat penelitian yaitu di Kota Surabaya	1. Terdapat variabel independen yang sama yaitu akuntabilitas dan transparansi 2. Terdapat variabel dependen yang sama yaitu Kinerja Anggaran Berkonsep <i>Value for Money</i> 3. Sama-sama sumber data primer uji instrument kuesioner 4. Teknik pengambilan sampel yang digunakan <i>Purposive Sampling</i>	1. Akuntabilitas berimplikasi positif baik secara parsial maupun simultan pada Kinerja Anggaran Berkonsep <i>Value for Money</i> pada Pemerintah Kota Surabaya 2. Akuntabilitas berimplikasi positif baik secara parsial maupun simultan pada Kinerja Anggaran Berkonsep <i>Value for Money</i> pada Pemerintah Kota Surabaya
2	Sari, Hanum dan Salman (2021)	Determinan Kinerja Anggaran Berbasis <i>Value for Money</i> pada Sektor Publik (Studi Pada SKPD Aceh Tamiang)	X1: Akuntabilitas X2: Ketepatan Waktu X3: Pengawasan Internal	1. Hanya menggunakan 2 variabel X 2. Terdapat Variabel Independen yang berbeda yaitu Pengawasan Internal	1. Terdapat variabel independen yang sama yaitu Akuntabilitas dan Ketepatan Waktu	1. Akuntabilitas, Pengawasan Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep

			Y: Kinerja Anggaran Berkonsep <i>Value for Money</i>	3. Populasi penelitian ini berjumlah 96 responden	2. Sama-sama sumber data primer uji instrument kuesioner	<i>Value for Money</i> 2. Ketepatan Waktu tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Anggaran Berbasis <i>Value for Money</i> 3. Akuntabilitas, Ketepatan Waktu dan Pengawasan Internal berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap Kinerja Anggaran Berbasis <i>Value for Money</i>
3	Victorinus Laoli (2019)	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Anggraan Berkonsep <i>Value for Money</i> Pada Pemerintah Kabupaten Nias	X1: Akuntabilitas X2: Transparansi Y: Kinerja Anggraan Berkonsep <i>Value for Money</i>	1. Hanya menggunakan 2 variabel x 2. Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten Nias	1. Terdapat variabel independen yang sama yaitu akuntabilitas dan transparansi 2. Sama-sama sumber data primer uji instrument kuesioner	1. Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Kinerja Anggraan Berkonsep <i>Value for Money</i> 2. Transparansi secara simultan tidak berpengaruh

						<p>terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep <i>Value for Money</i></p> <p>3. Akuntabilitas dan Transparansi secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep <i>Value for Money</i></p>
4	Dadan Ramadhan (2017)	Pengaruh Perencanaan anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten	<p>X1: Perencanaan Anggaran</p> <p>X2: Kualitas Sumber Daya Manusia</p> <p>X3: Pelaksanaan Anggaran</p> <p>Y: Penyerapan Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah</p>	<p>1. Terdapat variabel independen yang berbeda yaitu perenvanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran</p> <p>2. Pada penelitian ini dilakukan di beberapa OPD Provinsi Banten</p>	<p>1. Terdapat variabel independen yang samma yaitu Kualitas Sumber Daya Manusia</p> <p>2. Sama-sama penelitian kuantitatif</p> <p>3. Menggunakan instrument kuesioner</p>	<p>1. Perencanaan anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah</p>
5	Ni Luh Putu Premananda dan Ni Made Yenni Latrini (2017)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi terhadap Kinerja Anggraan pada	<p>X1: Akuntabilitas</p> <p>X2: Transparansi</p> <p>X3: Partisipasi</p> <p>Y: Kinerja Anggraan</p>	<p>1. Penelitian ini dilakukan pada 34 SKPD yang terdapat di Kota Denpasar</p>	<p>1. Terdapat variabel independen yang sama yaitu Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi</p>	<p>1. Akuntabilitas, transparansi dan partisipasi secara parsial maupun simultan berpengaruh positif pada</p>

		Pemerintah Kota Denpasar	Berkonsep <i>Value for Money</i>	2. Hanya menggunakan 3 variabel X	2. Jenis penelitian ini bersumber dari data primer	Kinerja Anggaran Berkonsep <i>Value for Money</i> pada Pemerintah Kota Denpasar
6	Yuni Shara, Debi Chyntia, Ovami, Rindhira Humairah (2020)	Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep <i>Value for Money</i> pada RSUD Djoelham Binjai	X1: Transparansi X2: Akuntabilitas Y: Kinerja Anggaran Berkonsep <i>Value for Money</i>	1. Menggunakan 69 sampel pegawai 2. Hanya menggunakan 2 variabel X	1. Terdapat variabel independen yang sama yaitu akuntabilitas dan transparansi 2. Sama-sama menggunakan teknik penelitian Purposive Sampling dan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner	1. Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan secara parsial dan simultan terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep <i>Value for Money</i> pada RSUD Djoelham Binjai 2. Transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep <i>Value for Money</i> pada RSUD Djoelham Binjai
7	Novi Lestari (2018)	Pengaruh Akuntabilitas, Ketepatan Waktu, dan Transparansi terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep <i>Value for</i>	X1: Akuntabilitas X2: Ketepatan Waktu X3: Transparansi Y: Kinerja Anggaran	1. Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Kota Palembang 2. Penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel x	1. Terdapat variabel independen yang sama yaitu akuntabilitas dan trsansparansi	1. Akuntabilitas, dan Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep

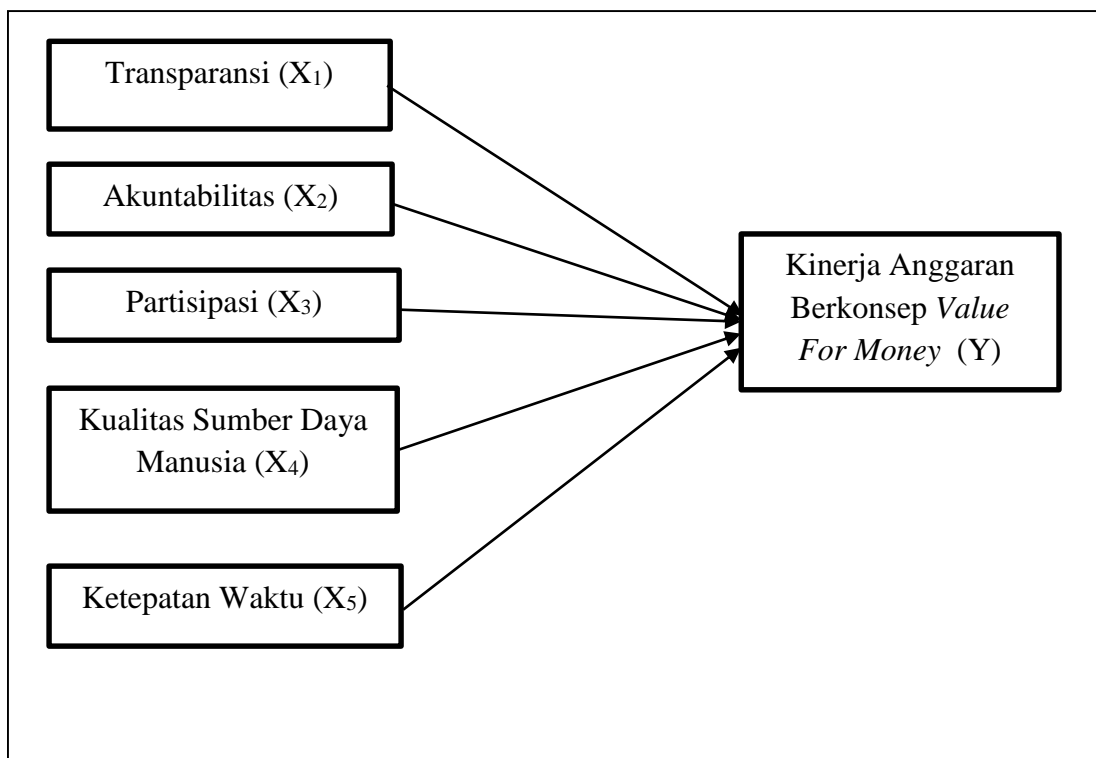
		<i>Money</i> pada Puskesmas Kota Palembang	Berkonsep <i>Value for Money</i>		<ul style="list-style-type: none"> 2. Sama-sama sumber data primer 3. Sama-sama menggunakan teknik penelitian Purposive Sampling 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Value for Money</i> 2. Ketepatan Waktu berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep <i>Value for Money</i>
--	--	--	----------------------------------	--	--	--

Sumber : Data yang diolah, 2022

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2018:60) mengemukakan bahwa: “Kerangka Berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting”

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan, dimana variable dependen (Y) dari penelitian ini adalah Kinerja Anggaran Berkonsep *Value For Money*. Dan untuk variable independen adalah Transparansi (X₁), Akuntabilitas (X₂), Partisipasi (X₃), Kualitas Sumber Daya Manusia (X₄) dan Ketepatan Waktu (X₅). Sehingga dapat dilihat kerangka konsep pada penelitian yang telah digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap suatu masalah yang dihadapi, yang masih akan diuji kebenarannya lebih lanjut melalui analisa data yang

relevan dengan masalah yang terjadi. Dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Sugiyono (2020:99) menyatakan “hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan dan dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data”.

2.4.1 Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep *Value For Money*

Transparansi mengacu kepada sikap yang mencerminkan sikap yang mencerminkan dalam hal pembuat kebijakan, peraturan dan informasi lain agar dapat tampak dari luar, artinya segala hal terkait dengan keputusan, peraturan maupun informasi lain dapat dipantau oleh pihak yang berada di luar proses pembuatan keputusan maupun informasi tersebut. Sama halnya dengan akuntabilitas, tidak adanya transparansi tertentu akan dapat menghasilkan penyalahgunaan dana publik oleh aparat pemerintahan (Hood, 2010)

Penelitian yang dilakukan oleh (Sari, 2018) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep *Value For Money*.

2.4.2 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep *Value For Money*

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010/Lampiran 1.01 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa “Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik”. Secara umum, dalam setiap pengelolaan anggaran perlu adanya akuntabilitas, dimana semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik. Pada pengelolaan anggaran perlu adanya akuntabilitas, dimana semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik baik dipusat

maupun didaerah.

Penelitian yang dilakukan oleh (Salman, 2021) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep *Value For Money*.

2.4.3 Pengaruh Partisipasi terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep *Value For Money*

Partisipasi dalam proses penyusunan APBD berbasis kinerja manajerial dan interaksi antara partisipasi anggaran dan motivasi berimplikasi secara signifikan terhadap kinerja manajerial. (Kartika, 2008) Keikutsertaan dalam penganggaran disinyalir mampu menaikkan kemampuan manajerial atasan di satuan kerja yang kemudian menaikkan kemampuan pemerintah menyeluruh (Hermaningsih, 2009: 21).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Latrini, 2017) menyatakan bahwa partisipasi berpengaruh positif terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep *Value For Money*.

2.4.4 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep *Value for Money*

Pengembangan SDM pada intinya diarahkan untuk meningkatkan kualitas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas. Hasil berbagai studi menunjukkan bahwa kualitas SDM merupakan faktor penentu produktivitas, baik secara makro maupun mikro. Sumber Daya Manusia (SDM) secara makro adalah warga Negara yang telah memasuki usia angkatan kerja yang memiliki potensi untuk berperilaku produktif (dengan atau tanpa berpendidikan formal) yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarganya, yang berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat di lingkungan bangsa atau negaranya (Badriyah, 2015)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Ramadhan, 2017) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep *Value For Money*.

2.4.5 Pengaruh Ketepatan Waktu terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep *Value For Money*

Ketepatan Waktu adalah yang menunjukkan bahwa ketepatan jadwal penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja majerial. Jika dalam sebuah anggaran daerah mampu memberikan informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu maka semakin tinggi pula kinerja anggaran berkonsep *Value for Money*. (Nadirsyah, 2012)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Lestari, 2018) menyatakan bahwa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep *Value for Money*.

2.4.6 Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketepatan Waktu berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep *Value for Money*

Transparansi merupakan keterbukaan informasi kepada masyarakat, dimana terdapat keterkaitan dengan faktor kinerja tersebut yaitu tergolong dalam faktor lingkungan kerja organisasi, dikarenakan keterbukaan dimulai dari lingkungan kerja selanjutnya kepada DPRD dan masyarakat. Keikutsertaan atau partisipasi dalam penganggaran disinyalir mampu menaikkan kemampuan atasan di satuan kerja yang kemudian menaikkan kemampuan pemerintah menyeluruh. Pengembangan SDM pada intinya diarahkan untuk meningkatkan kualitas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas. Hasil berbagai studi menunjukkan bahwa kualitas SDM merupakan faktor penentu produktivitas, baik secara makro maupun mikro. Sedangkan ketepatan waktu yang merupakan informasi yang disajikan tepat waktu ini tergolong pada faktor individu dimana adanya kesadaran sendiri untuk bekerja dengan cepat, tepat waktu sesuai dengan yang diharapkan .

Dengan adanya penjelasan dari transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kualitas sumber daya manusia dan ketepatan waktu maka berpengaruh terhadap kinerja anggaran yang berkonsep *value for money* yang digunakan adalah pengukuran ekonomi, pengukuran efisiensi, dan pengukuran efektivitas.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

- H1 :Diduga Transparansi berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep *Value for Money* Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan secara parsial
- H2 :Diduga Akuntabilitas berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep *Value for Money* Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan secara parsial
- H3 :Diduga Partisipasi berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep *Value for Money* Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan secara parsial
- H4 :Diduga Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep *Value for Money* Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan secara parsial
- H5 :Diduga Ketepatan Waktu berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep *Value for Money* Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan secara parsial
- H6 :Diduga Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketepatan Waktu berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep *Value for Money* Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan secara simultan